

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Majelis taklim merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam nonformal yang berperan dalam memberikan pembinaan keagamaan dan meningkatkan pemahaman agama di tengah masyarakat. Keberadaannya tumbuh dari kebutuhan serta partisipasi masyarakat, sehingga fungsinya tidak hanya terbatas pada penyampaian ajaran Islam, tetapi juga mencakup kegiatan dakwah, pembentukan karakter keagamaan, dan penguatan hubungan sosial masyarakat (Nasution, 2018). Dengan peran tersebut, majelis taklim menjadi salah satu wadah yang turut mendukung terbentuknya masyarakat yang memiliki pengetahuan keagamaan, akhlak, serta kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan oleh majelis taklim juga mengalami perluasan. Aktivitas majelis taklim tidak hanya berupa pengajian rutin, tetapi dapat mencakup pembinaan akhlak, pendidikan masyarakat, pembinaan generasi muda, peringatan hari besar Islam, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan (Jadidah & Mufarrohah, 2017). Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa majelis taklim memiliki karakter organisasi yang semakin kompleks karena pelaksanaan berbagai kegiatan membutuhkan keterlibatan pengurus, pembagian pekerjaan, serta koordinasi antarbagian. Kondisi tersebut menjadikan pengelolaan organisasi

sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menunjang keberlangsungan kegiatan majelis taklim.

Pengelolaan organisasi berkaitan erat dengan fungsi pengorganisasian karena melalui fungsi tersebut pekerjaan dan sumber daya manusia dapat disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengorganisasian diperlukan agar setiap anggota mengetahui tugas yang harus dilaksanakan, pihak yang memberikan arahan, serta tanggung jawab yang melekat pada perannya. Menurut Henri Fayol (1916), pengorganisasian merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam prinsip pengorganisasiannya, Fayol mengemukakan beberapa aspek, di antaranya pembagian kerja (*division of work*), kesatuan perintah (*unity of command*), **serta** wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*). Pembagian kerja berkaitan dengan pengaturan pekerjaan berdasarkan peran anggota, kesatuan perintah berkaitan dengan kejelasan sumber arahan, sedangkan wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan keseimbangan antara kewenangan yang dimiliki dan kewajiban yang harus dijalankan.

Pengorganisasian menjadi semakin diperlukan ketika sebuah organisasi melibatkan anggota dengan latar belakang, kemampuan, serta aktivitas yang berbeda. Perbedaan kondisi tersebut dapat memengaruhi keterlibatan anggota dalam menjalankan tugas organisasi. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang mampu memberikan kejelasan mengenai pekerjaan, arahan, dan tanggung

jawab setiap pengurus. Pengorganisasian yang tidak berjalan secara konsisten dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan tugas, seperti pekerjaan yang saling tumpang tindih, penyampaian informasi yang tidak seragam, maupun ketidakseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab.

Salah satu organisasi keagamaan yang menjalankan berbagai kegiatan dakwah dan sosial di Kota Bandung yaitu Majelis Taklim Badai Aswaja. Majelis ini berdiri pada 17 November 2017 dan pada awalnya berorientasi pada pembinaan kalangan pemuda sebelum berkembang dengan melibatkan masyarakat secara lebih luas. Berbagai kegiatan diselenggarakan dalam rangka mendukung aktivitas dakwah dan pembinaan keagamaan, di antaranya pengajian rutin, safari dakwah, pembinaan generasi muda, peringatan hari besar Islam, kegiatan ziarah, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, Majelis Taklim Badai Aswaja memiliki sekitar 20 pengurus aktif dan lebih dari 200 jamaah tetap. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pengurus memiliki posisi penting dalam mengelola dan mendukung berbagai kegiatan yang ditujukan kepada jamaah.

Keberagaman program dengan jumlah pengurus yang relatif terbatas menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pengaturan tugas yang terarah. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, terdapat kondisi ketika pengurus perlu membantu pekerjaan di luar bidang utamanya apabila pengurus yang bertanggung jawab tidak dapat menjalankan tugas. Kondisi tersebut

menjadi indikasi bahwa pembagian pekerjaan yang telah disusun dalam struktur organisasi masih dapat mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Pada proses penyampaian arahan, informasi kegiatan disampaikan melalui beberapa bentuk komunikasi, seperti rapat, komunikasi secara langsung, dan grup komunikasi pengurus. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai informasi kegiatan dan pembagian tugas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperhatikan kejelasan alur penyampaian arahan agar informasi yang diterima pengurus dapat dipahami secara sama.

Sementara itu, dalam pelaksanaan kewenangan, terdapat kondisi tertentu ketika keputusan yang berkaitan dengan kegiatan masih memerlukan keterlibatan ketua atau pimpinan. Keadaan tersebut menjadi indikasi bahwa pelaksanaan kewenangan pada masing-masing bagian masih perlu dilihat lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan tanggung jawab yang diberikan kepada pengurus.

Kondisi organisasi tersebut juga berkaitan dengan karakteristik pengurus yang memiliki aktivitas di luar kegiatan majelis. Kesibukan seperti pekerjaan, pendidikan, maupun aktivitas keluarga menyebabkan tingkat keterlibatan pengurus dalam kegiatan dapat berbeda. Dengan jumlah sekitar 20 pengurus yang mendukung pelaksanaan berbagai program bagi lebih dari 200 jamaah, kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting dalam melihat

bagaimana pembagian pekerjaan, penyampaian arahan, serta pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab diterapkan dalam kegiatan organisasi.

Permasalahan yang muncul bukan semata-mata berkaitan dengan keberadaan struktur organisasi, tetapi lebih pada pelaksanaan struktur tersebut dalam kegiatan nyata. Struktur yang telah dibentuk perlu didukung oleh pembagian pekerjaan yang jelas, alur arahan yang dapat dipahami, serta pemberian kewenangan yang sejalan dengan tanggung jawab pengurus. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas karena menentukan bagaimana pengurus menjalankan peran masing-masing dalam kegiatan organisasi.

Sejumlah penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pengorganisasian memiliki peranan dalam pengelolaan organisasi keagamaan. Mustofa, Muhyiddin, dan Nase (2017) menjelaskan bahwa pengelolaan majelis taklim memerlukan struktur organisasi yang teratur melalui pembagian tugas dan pengaturan kegiatan. Sunengsih (2021) menunjukkan bahwa pembagian tugas serta hubungan kerja yang jelas dapat membantu mendukung pelaksanaan tugas anggota organisasi. Maulana (2023) juga menjelaskan bahwa struktur organisasi dan pembagian pekerjaan berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta peningkatan kinerja pengurus dalam organisasi keagamaan.

Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pengorganisasian menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi keagamaan. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji prinsip

pengorganisasian Henri Fayol melalui pembagian kerja (*division of work*), kesatuan perintah (*unity of command*), serta wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*) pada majelis taklim sebagai organisasi yang berbasis pada keterlibatan masyarakat masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut menjadi relevan untuk dikaji dengan melihat kondisi Majelis Taklim Badai Aswaja yang memiliki beragam kegiatan, sekitar 20 pengurus aktif, lebih dari 200 jamaah, serta adanya indikasi persoalan dalam pelaksanaan pembagian tugas, penyampaian arahan, dan kewenangan pengurus.

Atas kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk memperoleh pemahaman mengenai fungsi pengorganisasian dalam mendukung pelaksanaan tugas pengurus. Kajian terhadap pembagian kerja, kesatuan perintah, serta wewenang dan tanggung jawab diperlukan untuk melihat bagaimana ketiga prinsip tersebut diterapkan dalam kegiatan organisasi dan faktor apa saja yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari kondisi nyata yang terdapat dalam pengelolaan organisasi, bukan hanya dari pentingnya pengorganisasian secara teoritis. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul “Fungsi Pengorganisasian Majelis Taklim dalam Meningkatkan Kinerja Pengurus (Studi Kasus di Majelis Taklim Badai Aswaja Kota Bandung).”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pembagian tugas (*division of Work*) pengurus Majelis Taklim Badai Aswaja Kota Bandung dalam mendukung kelancaran kegiatan majelis taklim?
2. Bagaimana kesatuan perintah (*unity of command*) dalam pelaksanaan tugas pengurus Majelis Taklim Badai Aswaja Kota Bandung?
3. Mengapa penetapan wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*) kepengurusan di Majelis Taklim Badai Aswaja Kota Bandung belum berjalan optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pengurus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembagian tugas (*division of Work*) pengurus Majelis Taklim Badai Aswaja Kota Bandung diterapkan dalam mendukung kelancaran kegiatan majelis taklim
2. Untuk mengetahui kesatuan perintah (*unit of command*) dalam pelaksanaan tugas pengurus Majelis Badai Aswaja Kota Bandung
3. Untuk mengetahui penyebab penetapan wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*) kepengurusan Majelis Taklim Badai Aswaja Kota Bandung belum berjalan optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pengurus.

D. Kegunaan Penelitian

1. Akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dalam bidang manajemen, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengorganisasian pada organisasi keagamaan yang berbasis masyarakat. Pembahasan mengenai prinsip pengorganisasian Henri Fayol (1916), yang meliputi pembagian kerja, kesatuan perintah, serta wewenang dan tanggung jawab, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pelaksanaan tugas pengurus pada organisasi keagamaan.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan organisasi keagamaan. Dampak akademis yang diharapkan yaitu bertambahnya informasi dan gambaran empiris mengenai fungsi pengorganisasian pada organisasi berbasis komunitas, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan penelitian dengan topik yang sejenis.

2. Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Majelis Taklim Badai Aswaja Kota Bandung melalui gambaran mengenai pelaksanaan fungsi pengorganisasian dalam menjalankan berbagai kegiatan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap

pembagian kerja, kesatuan perintah, serta wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pengurus.

Dampak praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah membantu pimpinan dan pengurus memperoleh bahan pertimbangan untuk memperjelas pembagian tugas, meningkatkan koordinasi dan penyampaian informasi, serta menyesuaikan pemberian wewenang dengan tanggung jawab masing-masing pengurus. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi tumpang tindih pekerjaan, menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas, dan membuat pelaksanaan peran pengurus menjadi lebih terarah.

Bagi organisasi keagamaan lain yang memiliki karakteristik serupa, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang dapat dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi terhadap pengorganisasian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan dampak berupa tersedianya masukan yang dapat digunakan untuk mendukung perbaikan pengelolaan pengurus dan pelaksanaan kegiatan organisasi secara lebih terstruktur.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

Secara bahasa, manajemen berasal dari kata bahasa Inggris *to manage* yang berarti melatih atau mengendalikan (*to handle*), mengurus, serta mengatur. Makna yang lebih spesifik dari *manage* yaitu *to direct and*

control (mengarahkan dan mengawasi), *to carry on business affairs* (menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu), serta *to treat with care* (menangani atau memperlakukan dengan penuh ketelitian). (Samsudin,2006-15).

Manajemen dapat dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Henri Fayol (1916) menjelaskan bahwa manajemen memiliki lima fungsi pokok, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemberian perintah atau pengarahan (*commanding*), pengoordinasian (*coordinating*), serta pengendalian (*controlling*). Pada organisasi keagamaan seperti majelis taklim, fungsi-fungsi manajemen tersebut sangat penting agar seluruh kegiatan dapat tersusun secara sistematis, berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan, serta mampu mempertahankan keberlangsungan organisasi secara berkesinambungan.

Penelitian ini menggunakan teori pengorganisasian Henry Fayol (1916), tokoh klasik manajemen, karena pengorganisasian menjadi fungsi manajerial yang penting untuk memastikan sumber daya manusia dan aktivitas organisasi digunakan secara efektif demi tercapainya tujuan organisasi. Dalam pendekatan kualitatif, teori ini membantu memahami praktik organisasi, khususnya dalam hal pembagian kerja, peran anggota, dan interaksi antaranggota (Handoko, 2015).

Henry Fayol (1916) menyatakan bahwa pengorganisasian merupakan upaya menyediakan semua kebutuhan organisasi sekaligus menyelaraskan usaha semua anggota agar tujuan organisasi dapat tercapai. Terry (2013) menambahkan bahwa pengorganisasian tidak hanya menyangkut struktur formal, tetapi juga mencakup pengelolaan hubungan kerja dan interaksi antaranggota agar organisasi berjalan harmonis.

Koontz dan Weihrich (2015) menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan suatu proses dalam mengatur dan menyusun berbagai sumber daya organisasi, khususnya sumber daya manusia, melalui pembagian pekerjaan, pengelompokan kegiatan, serta pengaturan hubungan kerja antaranggota. Proses tersebut bertujuan agar setiap unsur organisasi dapat menjalankan perannya secara terarah sehingga aktivitas organisasi dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Robbins & Coulter (2018) menyoroti sifat adaptif pengorganisasian, karena struktur dan peran dapat berubah sesuai kebutuhan. Selain itu, Munir & Ilahi (2015) menunjukkan bahwa dalam organisasi keagamaan, pengorganisasian juga melibatkan pemeliharaan nilai-nilai sosial dan spiritual, sehingga praktik organisasi tidak hanya bersifat formal tetapi juga sesuai budaya organisasi. Untuk memahami fungsi pengorganisasian lebih mendalam, Fayol membaginya menjadi tiga dimensi utama, yaitu pembagian tugas, penetapan wewenang dan tanggung jawab, serta koordinasi. Ketiga dimensi ini saling terkait dan menjadi dasar

agar organisasi dapat berjalan tertib, efisien, dan harmonis, termasuk pada organisasi keagamaan seperti Majelis Taklim Badai Aswaja Kota Bandung.

Prinsip pengorganisasian yang dikemukakan oleh Henri Fayol (1916) dalam 14 prinsip manajemen klasik merupakan dasar dalam mengatur organisasi agar dapat berjalan secara efektif. Prinsip tersebut mencakup pembagian kerja (*division of work*) yang menekankan penyesuaian tugas berdasarkan keahlian untuk meningkatkan efisiensi, serta wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*) yang menegaskan bahwa setiap pemegang jabatan harus memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab atas tugasnya.

Prinsip kesatuan perintah (*unity of command*) menekankan bahwa setiap individu hanya menerima instruksi dari satu atasan agar tidak terjadi tumpang tindih perintah, sedangkan kesatuan arah (*unity of direction*) menegaskan bahwa kegiatan yang memiliki tujuan sama harus berada dalam satu arahan yang terkoordinasi. Fayol juga menjelaskan bahwa kepentingan organisasi harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Selain itu, sistem imbalan (*remuneration*) perlu diberikan secara adil untuk menjaga motivasi kerja.

Prinsip sentralisasi (*centralization*) dan rantai hierarki (*scalar chain*) mengatur pembagian serta alur wewenang agar organisasi memiliki struktur yang jelas. Kemudian, prinsip ketertiban (*order*) menekankan

penempatan sumber daya dan individu pada posisi yang sesuai, sedangkan keadilan (*equity*) mengharuskan pimpinan bersikap adil kepada seluruh anggota organisasi. Stabilitas masa kerja (*stability of tenure*) diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kerja, sementara inisiatif (*initiative*) mendorong anggota organisasi untuk berperan aktif dan kreatif. Terakhir, semangat kebersamaan (*esprit de corps*) menekankan pentingnya kerja sama dan solidaritas dalam organisasi. Secara keseluruhan, keempat belas prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam memahami fungsi pengorganisasian.

Secara bahasa, istilah majelis taklim berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *majelis* yang bermakna tempat berkumpul atau tempat berlangsungnya suatu pertemuan, serta *taklim* yang berarti kegiatan belajar atau proses penyampaian ilmu. Berdasarkan pengertian tersebut, majelis taklim dapat dimaknai sebagai wadah masyarakat untuk berkumpul dalam rangka memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai ajaran agama Islam melalui kegiatan pembelajaran keagamaan (Kementerian Agama RI, 2009). Majelis taklim merupakan salah satu bentuk pendidikan Islam nonformal yang hadir di tengah masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam. Kegiatan yang umumnya dilaksanakan meliputi pengajian rutin, ceramah keagamaan, diskusi Islam, serta pembinaan akhlak yang bertujuan membentuk karakter muslim yang lebih baik (Daradjat, 2008).

Tidak hanya sebagai sarana pendidikan agama, majelis taklim juga memiliki fungsi sosial yang cukup penting. Majelis taklim menjadi wadah untuk mempererat hubungan silaturahmi antarjamaah, memperkuat rasa kebersamaan, serta membangun solidaritas sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, perannya tidak hanya terbatas pada pembelajaran agama, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang mempererat hubungan antaranggota masyarakat. Di samping itu, majelis taklim juga berperan sebagai media dakwah yang efektif dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Melalui kegiatan yang dilaksanakan secara rutin, majelis taklim menjadi sarana pembinaan umat dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT (Shihab, 2002). Dalam pelaksanaannya, majelis taklim biasanya memiliki struktur kepengurusan yang mengatur jalannya kegiatan agar lebih tertib dan terarah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaannya terdapat fungsi pengorganisasian, seperti pembagian tugas, koordinasi antar pengurus, serta penetapan wewenang dan tanggung jawab.

Kualitas merupakan salah satu aspek penting dalam organisasi, baik yang bergerak di bidang bisnis maupun nonbisnis, karena keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari mutu hasil kerja yang dihasilkan. Kualitas tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga menunjukkan sejauh mana suatu pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan serta harapan pihak yang menerima hasil tersebut.

Menurut Tjiptono (2004), kualitas diartikan sebagai *fitness for use*, yaitu tingkat kesesuaian suatu produk atau layanan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengertian ini menekankan bahwa kualitas berorientasi pada sejauh mana suatu produk atau layanan mampu memenuhi harapan pelanggan atau penerima layanan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Garvin dalam Tjiptono (2004) menjelaskan bahwa kualitas memiliki delapan dimensi, yaitu kinerja (*performance*), keandalan (*reliability*), kesesuaian (*conformance*), daya tahan (*durability*), kemudahan pelayanan (*serviceability*), estetika (*aesthetics*), kualitas yang dipersepsikan (*perceived quality*), dan fitur (*features*). Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa kualitas memiliki cakupan yang luas, tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga mencakup proses yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Kinerja pengurus menjadi variabel kedua dalam penelitian ini karena menunjukkan sejauh mana pengurus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi secara efektif. Penilaian kinerja tidak hanya didasarkan pada hasil akhir, tetapi juga mencakup kualitas pelaksanaan tugas, kedisiplinan, tanggung jawab, serta partisipasi aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan organisasi (Handoko, 2015). Indikator ini penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan aktivitas keagamaan.

Kinerja pengurus tidak hanya terlihat dari hasil pekerjaan yang dicapai, tetapi juga tercermin melalui kedisiplinan, kemampuan berkoordinasi, dan komitmen dalam mengelola setiap kegiatan organisasi. Mathis dan Jackson (2011) menjelaskan bahwa kinerja individu dalam organisasi dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki, usaha yang diberikan, serta dukungan organisasi yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan. Sementara itu, dalam organisasi dakwah, keberhasilan pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh adanya koordinasi dan kerja sama antaranggota agar tujuan dakwah dapat tercapai secara efektif (Munir & Ilaihi, 2015).

Hubungan kerja yang harmonis antar anggota menjadi salah satu indikator penting kinerja pengurus. Hasibuan (2016) menyatakan bahwa kerja sama yang baik dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan mengurangi potensi konflik internal. Selain itu, kinerja pengurus dipengaruhi oleh kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan kebutuhan organisasi (Handoko, 2015). Robbins & Coulter (2018) menekankan bahwa kinerja anggota dipengaruhi oleh keterampilan, motivasi, dan interaksi dengan anggota lain, sehingga pengurus yang disiplin, kooperatif, dan bertanggung jawab akan lebih mampu mencapai tujuan organisasi secara maksimal.

Kinerja pengurus tidak hanya dapat diukur melalui terlaksananya program kerja organisasi, tetapi juga terlihat dari kemampuan pengurus

dalam membangun komunikasi dan hubungan kerja antaranggota, menjaga keteraturan dalam organisasi, serta memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Siagian (2014) menjelaskan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam melaksanakan tugas, menjalin kerja sama, dan menciptakan hubungan kerja yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam organisasi dakwah, keberhasilan pengurus juga ditentukan oleh kemampuan dalam melakukan koordinasi, mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, serta mengarahkan anggota agar seluruh program dakwah dapat berjalan secara optimal (Munir & Ilaihi, 2015).

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara fungsi pengorganisasian dengan kinerja pengurus di Majelis Taklim Badai Aswaja Kota Bandung. Penelitian ini berasumsi bahwa efektivitas organisasi dakwah sangat bergantung pada kemampuan pengurus dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, yang dipengaruhi oleh fungsi pengorganisasian secara sistematis (Robbins & Coulter, 2018).

Kondisi awal organisasi meliputi struktur organisasi, kompetensi dan pengalaman pengurus, pedoman dan aturan internal majelis taklim, serta catatan kegiatan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi landasan penting bagi pengorganisasian yang baik. Struktur organisasi yang jelas

memudahkan pembagian tugas yang proporsional, kompetensi pengurus mendukung pelaksanaan tanggung jawab secara optimal, dan pedoman maupun pengalaman sebelumnya menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan (Griffin, 2017).

Fungsi pengorganisasian dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu pembagian tugas pengurus, penetapan wewenang dan tanggung jawab, serta koordinasi antaranggota organisasi. Pembagian tugas yang dilakukan secara jelas dan sesuai dengan peran masing-masing akan membantu pengurus memahami kewajibannya serta mencegah terjadinya pekerjaan yang saling tumpang tindih (Daft, 2016). Selain itu, penetapan wewenang dan tanggung jawab berfungsi memberikan batasan yang jelas mengenai hak dalam mengambil keputusan serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pengurus dalam organisasi (Jones & George, 2019). Adanya koordinasi yang baik antar pengurus juga berperan dalam menciptakan komunikasi yang efektif dan kerja sama yang harmonis sehingga setiap kegiatan majelis taklim dapat terlaksana secara terarah dan efisien.

Pelaksanaan fungsi pengorganisasian tersebut selanjutnya akan tercermin dalam kinerja pengurus. Kinerja pengurus dapat dilihat melalui kemampuan dalam menjalankan tugas secara tertib, melaksanakan tanggung jawab sesuai peran, membangun kerja sama antaranggota, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu,

pengorganisasian yang diterapkan secara sistematis tidak hanya berfungsi menciptakan struktur kerja yang jelas, tetapi juga mendukung peningkatan kemampuan pengurus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tujuan kegiatan dakwah dapat tercapai secara optimal (Koontz & Weihrich, 2015).

Kerangka konseptual penelitian ini menjelaskan bahwa fungsi pengorganisasian yang dilakukan secara terencana dan sistematis melalui pembagian tugas yang jelas, penetapan wewenang serta tanggung jawab yang sesuai, dan koordinasi yang efektif dapat menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kinerja pengurus Majelis Taklim Badai Aswaja Kota Bandung. Pengorganisasian yang baik membantu setiap anggota memahami peran, kewajiban, dan mekanisme kerja dalam organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung secara lebih tertib dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Robbins & Coulter, 2018).

Penelitian ini berfokus pada fungsi pengorganisasian sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kinerja pengurus Majelis Taklim Badai Aswaja Kota Bandung. Berdasarkan teori pengorganisasian Henry Fayol, penelitian ini menekankan beberapa aspek penting, yaitu pembagian tugas, penetapan wewenang dan tanggung jawab, serta kesatuan perintah antar pengurus. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam menciptakan sistem kerja yang terarah, memperjelas peran setiap anggota, meningkatkan

kedisiplinan, serta membangun komitmen pengurus dalam melaksanakan berbagai kegiatan organisasi.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Majelis Taklim Badai Aswaja yang beralamat di Jalan Kaum Wetan No. 16, Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat 40611. Lokasi tersebut dipilih karena Majelis Taklim Badai Aswaja merupakan organisasi keagamaan yang aktif melaksanakan berbagai kegiatan dakwah dan sosial yang melibatkan peran pengurus dalam setiap pelaksanaannya.

Pemilihan lokasi juga disesuaikan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Majelis Taklim Badai Aswaja memiliki struktur kepengurusan, sekitar 20 pengurus aktif, serta beragam kegiatan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan pembagian tugas, pemberian arahan, dan koordinasi antar pengurus. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji pembagian kerja, kesatuan perintah, serta wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pengurus.

2. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivistik yang memandang bahwa realitas sosial terbentuk melalui pengalaman, interaksi, dan pemahaman individu terhadap lingkungan sosialnya (Guba & Lincoln, 1994). Paradigma ini digunakan karena penelitian berusaha memahami

bagaimana pengurus memandang dan mengalami pelaksanaan fungsi pengorganisasian dalam menjalankan tugasnya, bukan hanya melihat keberadaan struktur organisasi secara formal.

Paradigma konstruktivistik dalam penelitian ini dilakukan dengan menggali pengalaman dan pandangan pimpinan, ketua umum, bendahara, bidang dakwah, dan pengurus aktif mengenai pembagian tugas, pemberian arahan, serta pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab. Informasi tersebut digunakan untuk memahami kondisi pengorganisasian berdasarkan pengalaman pihak yang terlibat langsung dalam kepengurusan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tiga prinsip pengorganisasian Henri Fayol, yaitu pembagian kerja, kesatuan perintah, serta wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pengurus. Data diperoleh melalui kata-kata, tindakan, hasil pengamatan, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami kondisi organisasi secara langsung, termasuk faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan pengorganisasian (Creswell, 2014).

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Metode studi kasus digunakan untuk memahami suatu fenomena

secara mendalam dengan tetap mempertahankan konteks kehidupan nyata tempat fenomena tersebut berlangsung (Yin, 2018).

Studi kasus dipilih karena penelitian ini secara khusus mengkaji fungsi pengorganisasian pada satu objek penelitian, yaitu Majelis Taklim Badai Aswaja Kota Bandung. Pengkajian dilakukan terhadap praktik pengorganisasian yang berlangsung dalam kegiatan organisasi, mulai dari pembagian tugas, proses penyampaian arahan, hingga pemberian dan pelaksanaan wewenang serta tanggung jawab. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami ketiga prinsip Henri Fayol tersebut berdasarkan kondisi nyata yang terjadi dalam kepengurusan.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu data dalam bentuk pernyataan, tindakan, hasil pengamatan, dan dokumen yang berkaitan dengan fenomena penelitian (Moleong, 2019). Data tersebut dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian.

Pada aspek pembagian kerja, data yang dicari berkaitan dengan kejelasan tugas, pembagian tugas berdasarkan bidang, kesesuaian tugas dengan kemampuan pengurus, tanggung jawab, dan hubungan kerja antarbagian. Pada aspek kesatuan perintah, data diarahkan pada proses pemberian dan penerimaan arahan serta koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, pada aspek wewenang dan tanggung jawab,

data berkaitan dengan pemberian kewenangan, pelaksanaan tanggung jawab, dan proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Dengan demikian, data yang dikumpulkan tidak hanya menggambarkan aktivitas majelis, tetapi diarahkan secara khusus untuk menjawab fokus penelitian mengenai fungsi pengorganisasian.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pihak yang terlibat dalam kepengurusan Majelis Taklim Badai Aswaja melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pimpinan, ketua umum, bendahara, bidang dakwah, dan pengurus aktif. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada keterlibatan mereka dalam pembagian tugas, pemberian dan penerimaan arahan, serta pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab organisasi. Observasi dilakukan terhadap aktivitas kepengurusan dan kegiatan majelis untuk melihat secara langsung bagaimana tugas dijalankan, koordinasi dilakukan, serta arahan dan tanggung jawab diterapkan.

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti struktur organisasi, arsip kegiatan, dokumentasi program, catatan administrasi, dan dokumen pendukung lainnya. Data tersebut digunakan untuk melengkapi serta memperkuat informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

5. Informan dan Unit Analisis

a. Informan

Informan penelitian merupakan pihak yang terlibat langsung dalam kepengurusan dan memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi. Informan terdiri atas pimpinan majelis, ketua umum, bendahara, bidang dakwah, dan pengurus aktif.

Pemilihan informan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian. Pimpinan dan ketua umum memberikan informasi mengenai arah organisasi, pembagian tugas, pemberian arahan, dan pengambilan keputusan. Bendahara memberikan informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab pada bidang keuangan. Bidang dakwah memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dalam kegiatan dakwah, sedangkan pengurus aktif memberikan gambaran mengenai pengalaman mereka dalam menjalankan tugas dan menerima arahan organisasi.

b. Teknik Penentuan Informan

Informan ditentukan dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam struktur kepengurusan, pengetahuan mengenai tugas organisasi, dan pengalaman dalam menjalankan tanggung jawab. Pertimbangan tersebut digunakan agar informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap hingga informasi yang diperoleh dianggap cukup untuk menjawab fokus

penelitian. Pengumpulan data dapat dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang sama dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang berkaitan dengan fokus penelitian atau telah mencapai kejenuhan data (*data saturation*) (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara bersamaan untuk memperoleh informasi yang saling melengkapi mengenai fungsi pengorganisasian.

a. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas kepengurusan dan kegiatan Majelis Taklim Badai Aswaja. Pengamatan difokuskan pada pelaksanaan pembagian tugas, cara pengurus menjalankan perannya, proses pemberian arahan, koordinasi antarbagian, serta pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab. Hasil observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi nyata di lapangan sekaligus membandingkannya dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui diskusi tatap muka dengan tujuan tertentu. Menurut

Moleong (2013:186), Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara langsung mengenai pengalaman dan pemahaman informan terhadap pelaksanaan fungsi pengorganisasian. Wawancara dilakukan kepada pimpinan, ketua umum, bendahara, bidang dakwah, dan pengurus aktif.

Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan tiga fokus penelitian. Pertanyaan mengenai pembagian kerja diarahkan pada proses pembagian tugas dan pelaksanaan tanggung jawab. Pertanyaan mengenai kesatuan perintah diarahkan pada pihak yang memberikan arahan, proses penyampaian informasi, serta pelaksanaan instruksi. Sementara itu, pertanyaan mengenai wewenang dan tanggung jawab diarahkan pada pemberian kewenangan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tanggung jawab pengurus. Wawancara juga digunakan untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat ketiga prinsip tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang tersimpan secara tertulis atau rekaman yang relevan dengan objek penelitian. Menurut Irawan Soehartono (2008:69), dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berfokus pada pengumpulan dokumen pendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat informasi mengenai struktur organisasi, pembagian bidang, kegiatan

yang dilaksanakan, dan pelaksanaan tugas pengurus. Data dokumentasi kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dan observasi.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan sesuai dengan kondisi yang ditemukan selama penelitian. Teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pimpinan, ketua umum, bendahara, bidang dakwah, dan pengurus aktif. Perbandingan tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian informasi mengenai pembagian kerja, kesatuan perintah, serta wewenang dan tanggung jawab.

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Sebagai contoh, informasi mengenai pembagian tugas yang disampaikan oleh pengurus dibandingkan dengan struktur organisasi dan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengecekan informasi pada waktu atau kondisi yang berbeda untuk melihat konsistensi jawaban informan (Sugiyono, 2019). Melalui ketiga bentuk triangulasi tersebut, data yang diperoleh dapat diperiksa kembali sebelum digunakan dalam proses analisis.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap krusial dalam penelitian kualitatif karena pada fase ini data mentah yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi diolah menjadi informasi yang bermakna dan relevan dengan fokus penelitian. Proses ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam praktik pengorganisasian serta kinerja pengurus Majelis Taklim Badai Aswaja. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang menekankan keterkaitan antara pengumpulan data, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan.

a. Reduksi Data

Tahap pertama yaitu reduksi data, merupakan proses memilah, menyaring, dan memfokuskan informasi yang dianggap paling relevan. Reduksi data tidak semata-mata untuk mengurangi volume data, tetapi bertujuan menekankan informasi yang signifikan terkait pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta peran struktur organisasi dalam mendukung kinerja pengurus. Dalam penelitian ini, reduksi dilakukan dengan menelaah hasil wawancara bersama pimpinan majelis, ketua, bendahara, sekretaris, beberapa pengurus, dan anggota aktif yang terlibat dalam kegiatan majelis. Catatan observasi yang merekam aktivitas harian majelis, termasuk rapat pengurus, kegiatan pengajian rutin, dan proses perencanaan program, juga dianalisis. Selain itu,

dokumen pendukung seperti struktur organisasi, notulen rapat, dan agenda kegiatan tahunan diseleksi untuk menemukan bukti yang relevan dan mendukung. Informasi mengenai pembagian peran, koordinasi kerja, dan interaksi antaranggota digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema penting dan pola yang muncul dalam pengelolaan majelis.

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Data dapat disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan wawancara, dan ringkasan dokumentasi sehingga pola interaksi antaranggota, mekanisme koordinasi, serta pembagian peran dapat dipahami secara jelas. Penyajian naratif ini juga memungkinkan peneliti untuk menunjukkan bagaimana setiap elemen dalam organisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi, saling berkaitan dan berdampak pada kinerja pengurus Majelis Taklim Badai Aswaja. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell (2014), yang menyatakan bahwa penyajian naratif membantu pembaca memahami konteks sosial dan kondisi nyata di lapangan, serta hubungan antarkomponen dalam organisasi.

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu proses penarikan kesimpulan. Kesimpulan diperoleh secara bertahap dan terus diuji ulang dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Proses verifikasi ini menggunakan prinsip triangulasi data dan *member checking* sesuai dengan Lincoln dan Guba (1985), sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan dengan memastikan bahwa informasi dari pimpinan majelis dan pengurus selaras, serta didukung oleh observasi lapangan dan dokumen resmi. Dengan metode ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang akurat mengenai bagaimana sistem pengorganisasian yang jelas, mekanisme koordinasi yang baik, dan pembagian peran yang terstruktur dapat meningkatkan kinerja pengurus Majelis Taklim Badai Aswaja.

